



Indikator Kesejahteraan Rakyat KABUPATEN CIANJUR 2020



Indikator Kesejahteraan Rakyat KABUPATEN CIANJUR 2020

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Cianjur 2020

ISSN : -
Nomor Publikasi : 32030.2138

Ukuran Buku : 18,2 x 25,7 cm
Jumlah Halaman : vi + 49 halaman

NASKAH:

BPS Kabupaten Cianjur

ILUSTRASI SAMPUL :

Bayu Bastian Jumena, S.ST

DITERBITKAN OLEH:

BPS Kabupaten Cianjur

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN CIANJUR 2020

Tim Penyusun

- Pengarah : Dani Jaelani, S.Si.,M.T.
- Penanggung jawab : Warji Permana, SE
- Penulis : 1. Bayu Bastian Jumena, S.ST
2. Warji Permana, SE
3. Ani Saebani, S.Si
- Editor/Penyunting : 1. Warji Permana, SE
2. Bayu Bastian Jumena S.ST
- Pengolah Data/
Penyiapan Draft : Bayu Bastian Jumena, S.ST
-

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami haturkan kehadirat Allah SWT, karena perkenan-Nyalah publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Cianjur Tahun 2020 telah selesai. Publikasi ini berisi indikator-indikator kesejahteraan rakyat di Kabupaten Cianjur yang mencakup bidang Kependudukan, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Perumahan, Pengeluaran Rumahtangga dan Sosial Ekonomi.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan publikasi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran untuk kesempurnaan publikasi ini di masa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga publikasi ini dapat terselesaikan. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Cianjur, November 2021
Kepala BPS Kabupaten Cianjur,



Dani Jaelani, S.Si.,M.T.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
1. KEPENDUDUKAN.....	I
2. KESEHATAN.....	8
3. PENDIDIKAN.....	18
4. KETENAGAKERJAAN.....	25
5. TARAF DAN POLA KONSUMSI.....	30
6. PERUMAHAN.....	35
7. SOSIAL LAINNYA	39

DAFTAR TABEL

	Halaman
KEPENDUDUKAN	
I.1 Jumlah, laju pertumbuhan penduduk dan rasio jenis kelamin, 2016-2020.....	3
I.2 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan menurut jenis kelamin Tahun 2020.....	5
I.3 Persentase Perempuan Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kab. Cianjur, 2020.....	6
I.4 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Perkawinan, 2020.....	7
KESEHATAN	
2.1 Angka Kesakitan dan Penggunaan Jaminan Kesehatan 2020.	11
2.2 Persentase Penduduk Umur 0-23 Bulan (Baduta) yang Pernah Diberi ASI dan Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan) menurut Karakteristik, 2019 dan 2020.....	13
2.3 Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Mempunyai Kartu Imunisasi dan Mendapat Imunisasi Lengkap menurut Karakteristik, 2020.....	14
2.4 Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (balita) yang Pernah Mendapat Imunisasi menurut Karakteristik dan Jenis Imunisasi, 2020.....	15
2.5 Berat Badan Bayi yang Dilahirkan Terakhir Menurut Karakteristik, 2020.....	16
PENDIDIKAN	
halaman	
3.1 Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata lama	21

	sekolah Kabupaten Cianjur 2018 s.d 2020.....	
3.2	Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2019.....	22
3.3	Persentase Penduduk 15 tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Ijazah tertinggi yang Dimiliki, 2020	23

KETENAGAKERJAAN

4.1	Jumlah Penduduk Usia Kerja Berdasarkan Karakteristik, Cianjur 2020	27
4.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Cianjur, 2020.....	27
4.3	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cianjur 2020.....	28
4.4	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cianjur, 2020.....	29

TARAF DAN POLA KONSUMSI

Halaman

5.1	PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Kab. Cianjur Menurut Pengeluaran Tahun Cianjur 2016-2020 (Juta Rupiah).....	31
5.2	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut	33

Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran
(Rupiah), 2020.....

PERUMAHAN

6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2020.....	37
6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2020.....	37
6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama, 2020.....	37

SOSIAL LAINNYA

Halaman

7.1	Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir, 2020.....	41
7.2	Persentase Rumah Tangga yang mendapat Program Perlindungan Sosial menurut Karakteristik Tahun 2020.....	42

<https://cianjurkab.bps.go.id>

BAB I KEPENDUDUKAN

Penduduk merupakan salah satu komponen penting pembangunan nasional. Jika dilihat dari peranannya, penduduk memiliki fungsi sebagai produsen yang menghasilkan barang bernilai ekonomi, di sisi lain sekaligus sebagai konsumen hasil produksi barang ekonomi tersebut. Apabila penduduk berperan maksimal dalam kegiatan perekonomian maka sektor ekonomi akan semakin bergairah. Dampak langsung dari hal ini adalah meningkatnya daya beli masyarakat dan meningkatkan permintaan barang dan jasa, sehingga proses ini diharapkan dapat menjadi mata rantai pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang menyokong ibukota negara Indonesia, oleh sebab itu Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang merasakan langsung dampak positif maupun negatif dari pembangunan yang dilakukan DKI Jakarta. Begitu pula dengan Kabupaten Cianjur yang memiliki peran sebagai salah satu perlintasan Bandung menuju Jakarta, terlebih kini sedang dilakukan kajian pembangunan jalan tol Bekasi-Bandung. Hal ini memberikan dampak yang positif bagi kegiatan ekonomi di Kabupaten Cianjur sebagai kota yang dilalui jalur perlintasan tersebut. Namun selain dampak positif, dampak negatif yang tidak dapat terhindar juga terasa, seperti semakin banyak pencari kerja yang keluar dari Cianjur karena akses yang mudah.

Series data kependudukan diperlukan untuk mengetahui apakah

Penduduk merupakan pelaku usaha sekaligus pengguna barang dan jasa . Keberhasilan kebijakan dalam kependudukan sangat menentukan kondisi perekonomian dan kesejahteraan penduduk.

pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh lapisan masyarakat terutama pembangunan yang berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Pemerintah telah membuat proyeksi penduduk berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010. Diharapkan data ini dapat dijadikan pertimbangan untuk menyusun langkah strategis ke depan.

1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Salah satu masalah klasik kependudukan yang terjadi di Jawa Barat dan terus menjadi perhatian pemerintah adalah jumlah penduduk yang besar. Kabupaten Cianjur sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.264.328 jiwa berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010. Dalam lingkup wilayah Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cianjur menduduki peringkat ke-10 kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak dari 27 Kabupaten Kota.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Cianjur pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,05 persen, jika dibandingkan pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya maka terlihat tren yang menurun. Pada tahun 2015, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Cianjur sebesar 0,38 persen mengalami penurunan menjadi 0,32 persen pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 kembali menurun menjadi 0,25 persen, pada tahun 2018 turun 0,18 persen dan pada tahun 2019 menjadi 0,11 persen. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk telah menunjukkan adanya keberhasilan.

Tabel I.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin, 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	2.250.977	0,32	106,009
2017	2.256.589	0,25	105,880
2018	2.260.620	0,18	105,768
2019	2.263.072	0,11	105,643
2020	2.264.328	0,05	105,549

Sumber: Proyeksi Penduduk

Hasil sensus penduduk di Kabupaten Cianjur pada tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk tertinggi dicapai oleh Kecamatan Sukaluyu (2,4 persen) disusul Kecamatan Karangtengah (1,97 persen) dan Kecamatan Cilaku (1,90 persen). Sedangkan Laju Pertumbuhan penduduk terendah di Kecamatan Leles (-0,1 persen).

Berdasarkan data laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Cianjur dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk antar kecamatan cenderung heterogen artinya terjadi pertumbuhan penduduk yang tidak merata pada tahun 2020.

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan, secara rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Cianjur pada tahun 2020 sebesar 105. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 105 penduduk laki-laki.

Hal ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Cianjur lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.

1.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk berdasarkan kecamatan di Kabupaten Cianjur paling banyak berada di Kecamatan Cianjur sebesar 173.265 jiwa atau sebesar 6,99 persen, Kecamatan Karangtengah 164.367 atau sebesar 6,63 persen dan Kecamatan Cibeber sebesar 133.786 jiwa atau sekitar 5,40 persen, Kecamatan Cilaku sebesar 117.658 jiwa atau sebesar 4,75 persen, Kecamatan Cugenang sebesar 117.211 jiwa atau sebesar 4,73 persen, Kecamatan Cipanas sebesar 113.592 jiwa atau sebesar 4,58 persen, dan Kecamatan Pacet sebesar 110.970 jiwa atau sebesar 4,48 persen. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Campakamulya sebesar 24.020 jiwa atau sebesar 0,97 persen.

Kepadatan Penduduk tertinggi di Kabupaten Cianjur berada pada Kecamatan Cianjur yaitu 6.626 penduduk per km² disusul Kecamatan Karangtengah 3.387 penduduk per km² Kecamatan Pacet 2.664 penduduk per km². Sedangkan Kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah adalah Kecamatan Naringgul sebanyak 169 penduduk per km².

Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak memadainya penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya. Di sisi lainnya, wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi

sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja padahal banyak sumber daya yang dapat dimanfaatkan.

1.3 Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 1.2. Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan (%) Tahun 2020

Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk	Angka Beban Ketergantungan
(1)	(2)	(3)
0-14	639.614	37,67
15-64	1.697.776	-
65+	140.170	8,26
Jumlah Penduduk	2.477.560	45,93

Sumber : Hasil SP2020

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Hal ini disebabkan dengan semakin kecilnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Selama periode 2015-2020 angka beban ketergantungan terus mengalami penurunan, pada tahun 2020 Kabupaten Cianjur mulai memasuki era bonus demografi (*dependency ratio* < 50%) yaitu kondisi terdapat potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur umur

penduduk, dengan angka beban tanggungan penduduk Cianjur sebesar 45,93 persen. Bonus demografi harus diiringi dengan peningkatan produktivitas dari penduduk usia kerja. Jika tidak malah akan menjadi bencana demografi seperti tingginya angka pengangguran.

1.4 Rata-rata Usia Perkawinan Pertama

Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya pertambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya.

Tabel 1.3. Persentase Perempuan Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kab. Cianjur, 2020

Umur Perkawinan Pertama	Cianjur	Bogor	Sukabumi
<= 16 Tahun	34,09	16,8	26,84
17-18 Tahun	27,23	24,68	28,18
19-20 Tahun	19,76	23,02	26,19
>= 21 Tahun	18,93	35,5	18,79
Total	100	100	100

Sumber: Statistik Kesra Provinsi Jawa Barat 2020

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan

Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun. Sedangkan menurut data di tahun 2020 perempuan pernah kawin yang menikah di umur \geq 21 Tahun Sebanyak 18,93 persen, terendah dari kelompok umur yang lain.

Tabel 1.4. Persentase Penduduk Berumur 10 tahun ke atas Tahun menurut Karakteristik dan Status Perkawinan, 2020

Karakteristik	Status Perkawinan		
	Belum Kawin	Kawin	Cerai
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin			
Laki-laki	35,72	59,30	4,99
Perempuan	24,22	62,52	13,26
Kelompok Pengeluaran			
40 Persen Terbawah	33,80	57,87	8,33
40 Persen Tengah	29,70	60,47	9,83
20 Persen Teratas	24,09	67,25	8,66
Cianjur	30,13	60,87	9,01

Sumber: Statistik Kesra Kabupaten Cianjur 2020

Sebanyak 59,30 persen penduduk laki-laki usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Cianjur berstatus kawin, sebanyak 35,72 persen berstatus belum kawin, dan sebesar 4,99 persen berstatus cerai, baik cerai hidup maupun cerai mati. Sedangkan penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Cianjur sebanyak 62,52 persen berstatus menikah, 24,22 persen berstatus belum kawin, sebanyak 13,26 persen berstatus cerai baik cerai hidup maupun cerai mati.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, penduduk yang masuk kategori 40 persen tengah memiliki persentase tertinggi pada angka perceraian dengan

9,83 persen, diikuti penduduk dengan kategori 20 persen teratas dengan 8,66 persen dan kategori 40 terbawah memiliki persentase terendah. Sedangkan untuk status belum kawin, kelompok pengeluaran 40 persen terbawah memiliki persentase tertinggi dengan angka 33,80 persen.

BAB II KESEHATAN

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia pada suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan angka harapan hidup.

Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, menyediakan sumber daya kesehatan

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan lain-lain.

yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

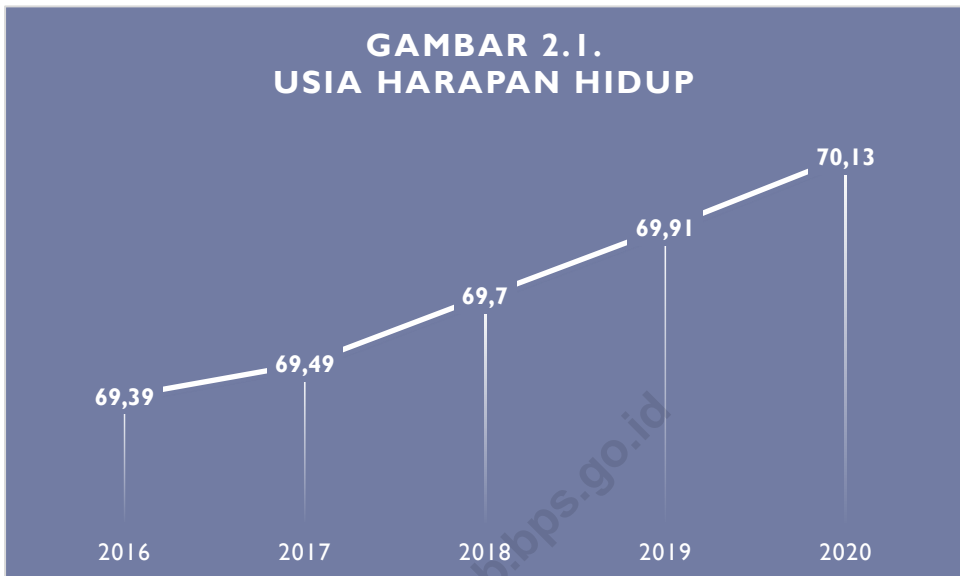
Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

2.1. Derajat dan Status Kesehatan

Tingkat kesehatan di suatu negara salah satunya dapat dilihat dari besarnya usia harapan hidup penduduknya. Berdasarkan sumber data analisis angka harapan hidup, Semakin membaiknya kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Cianjur telah diiringi dengan peningkatan angka harapan hidupnya, tercatat dari sejak tahun 2010 sampai dengan 2020 Angka harapan hidup selalu meningkat.

Peningkatan angka harapan hidup ini sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain semakin baik dan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

**GAMBAR 2.1.
USIA HARAPAN HIDUP**



Umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan dari 69,39 pada tahun 2016 menjadi 69,49 pada tahun 2017, 69,70 pada tahun 2018, 69,91 pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 sebesar 70,13 yang artinya anak yang lahir pada tahun 2020 memiliki angka harapan hidup hingga 70 tahun. Akan tetapi angka ini masih dibawah rata-rata umur harapan hidup Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan yang mencapai angka 73 tahun.

Indikator lain yang dapat dilihat untuk menunjukkan keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan adalah morbiditas (angka kesakitan). Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, morbiditas menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan

pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut.

Tabel 2.1 Angka Kesakitan dan Penggunaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Cianjur 2020

Karakteristik	Angka Kesakitan	Menggunakan Jaminan Kesehatan Untuk Berobat Jalan
(1)	(2)	(3)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	20,58	78,83
Perempuan	21,19	77,98
Kelompok Pengeluaran		
40 Persen Terbawah	17,90	74,88
40 Persen Tengah	23,90	83,48
20 Persen Atas	20,78	74,62
Cianjur	20,88	78,38

Sumber: Statistik Kesra Kabupaten Cianjur Tahun 2020

Dari angka di atas dapat dikatakan bahwa pada tahun 2020, sebanyak 20,88 persen dari seluruh penduduk Cianjur pernah mengalami keluhan kesehatan, dengan 78,38 persen diantaranya menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan. Bila dilihat lebih lanjut penduduk dengan jenis kelamin perempuan memiliki persentase sedikit lebih tinggi dengan angka 21,19 persen dibanding penduduk laki-laki yang memiliki angka 20,58 persen.

Lebih jauh, penduduk dengan karakteristik kelompok pengeluaran tengah memiliki persentase angka kesakitan dan persentase penduduk yang menggunakan jasa kesehatan untuk berobat jalan paling tinggi dibandingkan dengan kelompok pengeluaran lainnya dengan angka 23,90 dan 83,48 persen diantaranya menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan. Dan yang menarik, justru penduduk dengan karakteristik kelompok pengeluaran terbawah memiliki persentase angka kesakitan terendah dengan 17,90 persen, cukup jauh dari kategori lainnya dan hanya 74,88 persen yang menggunakan jaminan kesehatan yang artinya masih ada 1 dari 4 orang yang sakit tidak menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan.

2.2. Tingkat Imunitas Balita

Ibu yang sedang mengandung harus memperhatikan asupan yang dimakannya dan melakukan imunisasi, karena hal tersebut merupakan gizi dan imunisasi awal seorang anak dimulai. Kemudian setelah sang anak lahir, memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi sangat dianjurkan, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak dan memiliki manfaat sangat besar untuk jangka panjang sang anak. Hal ini dikarenakan ASI adalah nutrisi terbaik dan terlengkap, mengandung protein dan zat-zat gizi berkualitas tinggi serta mengandung zat antibodi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi, dan melindungi tubuh bayi dari alergi dan diare serta penyakit infeksi lainnya. Oleh sebab itu pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan hingga 6 bulan ke depan, tanpa menambahkan atau mengganti

makanan/minuman lain, setelah bayi berusia 6 bulan ke atas dapat dilanjutkan bersamaan dengan makanan tambahan, dan ASI tetap diberikan hingga usia anak 2 tahun.

Tabel 2.2. Persentase Penduduk Umur 0-23 Bulan (Baduta) yang Pernah Diberi ASI dan Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan) menurut Karakteristik, 2019 dan 2020

Karakteristik	Persentase Baduta Pernah Diberi ASI		Rata-rata Lama Pemberian ASI 2020
	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis kelamin			
Laki-laki	97,43	94,41	11,21
Perempuan	97,87	95,46	11,84
Cianjur	97,63	94,92	11,52

Sumber: Statistik Kesra Kabupaten Cianjur Tahun 2019 dan 2020

Pada tahun 2020 sebanyak 94,92 persen anak usia 0 sampai dengan 23 bulan pernah diberi ASI, turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai angka 97,63 persen. Apabila dirinci berdasarkan jenis kelamin maka persentase balita perempuan yang pernah diberi ASI 95,46 persen dari keseluruhan balita perempuan usia 0-23 bulan dan sebanyak 94,41 persen untuk balita laki-laki. Sedangkan untuk rata-rata lamanya pemberian ASI di Kabupaten Cianjur adalah 11 bulan, dan jika dirinci berdasarkan jenis kelamin, baik balita laki-laki maupun perempuan rata-rata diberikan ASI selama 11 bulan. Angka ini menunjukkan kesadaran masyarakat cukup tinggi bahwa ASI merupakan kebutuhan penting bayi. Walaupun seorang ibu dianjurkan

menyusui bayinya hingga berumur dua tahun, karena semakin lama bayi mendapatkan ASI akan memberikan kekebalan/proteksi yang lebih baik.

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Terdapat dua jenis imunisasi yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif dimana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang di sekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B.

Tabel 2.3 Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Mempunyai Kartu Imunisasi dan Mendapat Imunisasi Lengkap menurut Karakteristik, 2020

Karakteristik	Memiliki Kartu Imunisasi	Mendapatkan Imunisasi Lengkap
(1)	(2)	(3)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	52,29	46,24
Perempuan	55,17	35,38
Pendidikan Tertinggi KRT		
SD Ke Bawah	51,28	36,07
SMP Ke Atas	57,08	47,72
Cianjur	53,70	40,92

Sumber: Statistik Kesra Kabupaten Cianjur Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui pada tahun 2020 persentase balita di Cianjur yang memiliki kartu imunisasi 53,70 persen dan yang mendapat imunisasi lengkap sebesar 40,92 persen. Berdasarkan jenis kelamin, balita dengan jenis kelamin perempuan memiliki persentase yang lebih tinggi dalam kepemilikan kartu imunisasi dengan 55,17 persen, akan tetapi bila dilihat dari sisi balita yang mendapat imunisasi lengkap persentasenya lebih rendah dibanding balita dengan jenis kelamin laki-laki yang mencapai angka 46,24 persen walaupun hanya 52,29 persen yang memiliki kartu imunisasi. Bila dilihat lebih lanjut balita dengan karakteristik KRT berpendidikan SD ke bawah memiliki persentase yang lebih rendah baik dari sisi kepemilikan kartu imunisasi maupun balita yang mendapatkan imunisasi lengkap.

Tabel 2.4 Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (balita) yang Pernah Mendapat Imunisasi menurut Karakteristik dan Jenis Imunisasi, 2020

Karakteristik	Imunisasi				
	BCG	DPT	Polio	Campak	Hepatitis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki	86,93	80,53	87,08	66,26	74,30
Perempuan	81,56	74,41	81,54	49,34	70,54
Cianjur	84,30	77,53	84,37	57,97	72,46

Sumber: Statistik Kesra Kabupaten Cianjur Tahun 2020

Pada tahun 2020 dari total balita yang ada persentase balita yang pernah mendapatkan imunisasi BCG sebanyak 84,30 persen, DPT 77,53 persen, polio 84,37 persen, campak 57,97 persen, dan Hepatitis B 72,46 persen. Balita dengan jenis kelamin laki-laki yang mendapat imunisasi memiliki persentase lebih tinggi dibandingkan balita dengan jenis kelamin perempuan

dengan angka BCG 86,93 persen, DPT 80,53 persen, Polio 87,08 persen, Campak 66,26 persen. Imunisasi campak merupakan jenis imunisasi yang paling rendah tingkat penggunaannya dibandingkan dengan jenis imunisasi lain dan yang tertinggi adalah imunisasi Polio.

2.3. Pemanfaatan Tenaga Kesehatan

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dalam proses persalinan salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan oleh tenaga medis dikategorikan paling ideal karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitas tenaga kesehatan. Seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa.

Tabel 2.5. Berat Badan Bayi yang Dilahirkan Terakhir Menurut Karakteristik, 2020

Karakteristik	Berat Badan Bayi Lahir (kg)		
	< 2,5	≥ 2,5	Tidak Ditimbang
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin			
Laki-laki	15,78	81,36	2,86
Perempuan	-	100,00	-
Kelompok Pengeluaran			

40 Persen Terbawah	18,23	78,20	3,57
40 Persen Tengah	10,75	86,49	2,76
20 Persen Teratas	18,37	81,63	-
Cianjur	15,24	81,99	2,77

Sumber: Statistik Kesra Kabupaten Cianjur Tahun 2020

Lebih dari 90 persen bayi yang dilahirkan oleh wanita usia 15-49 tahun selama dua tahun terakhir sudah memenuhi standar berat badan bayi lahir normal yaitu lebih dari atau sama dengan 2,5 kilogram. Namun masih terdapat 15,24 persen bayi yang dilahirkan dengan berat lahir di bawah 2,5 kg. Bila dilihat dari sudut pandang kelompok pengeluaran, 20 persen dengan pengeluaran teratas memiliki persentase tertinggi untuk kelahiran bayi dengan berat badan dibawah 2,5 kg, diikuti dengan kategori 40 persen terbawah dan di posisi terendah dengan angka persentase 10,75 persen, cukup jauh dengan kategori lainnya.

Berat bayi lahir yang kurang dari 2,5 kg dapat disebabkan oleh berbagai macam sebab, di antaranya gangguan kesehatan saat ibu hamil, kekurangan asupan nutrisi saat proses kehamilan, ataupun terdapat gangguan kesehatan pada ibu hamil. Untuk itu diperlukan pemeriksaan yang rutin dan berkualitas selama proses kehamilan.

BAB III PENDIDIKAN

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang UU No. 20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warganegara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah, Tingkat Pendidikan. Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS.

UU No. 20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

3.1. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling* - EYS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

3.2. Rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ *Mean Years School* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan. Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menempuh berbagai upaya dengan meningkatkan waktu rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antar jenjang pendidikan.

**Tabel 3.1. Angka Harapan Lama Sekolah dan
Angka Rata-rata lama sekolah Kabupaten Cianjur
2018 s.d 2020**

Indikator Pendidikan	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(3)
Angka Harapan Lama Sekolah	11,90	11,98	11,99
Rata-rata lama sekolah	6,93	6,97	7,18

Sumber: BRS IPM Jawa Barat Tahun 2020

Angka harapan lama sekolah di kabupaten Cianjur pada tahun 2020 mengalami kenaikan tipis menjadi 11,99 dibanding tahun sebelumnya. Artinya pada tahun 2020 lamanya sekolah yang diharapkan oleh penduduk usia 7 tahun ke atas adalah 11,98 tahun atau hampir setara dengan bersekolah sampai lulus SMA. Sama halnya dengan Angka Harapan Lama sekolah, Rata-rata Lama Sekolah pada periode yang sama pun mengalami peningkatan. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 adalah 7,18 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Cianjur pada tahun 2020 rata-rata bersekolah selama 7,18 tahun atau setara dengan kelas I SMP. Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan kondisi pembangunan sistem pendidikan di kabupaten Cianjur menuju ke arah yang lebih baik.

3.3. Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya

keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Tabel 3.2 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2020

Karakteristik	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Masih Bersekolah			Tidak Bersekolah Lagi
		SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jenis Kelamin					
Laki-laki	0,09	38,43	17,80	10,99	32,69
Perempuan	0,55	38,12	13,12	10,97	37,25
Kelompok Pengeluaran					
40 Persen Terbawah	0,69	40,70	17,65	9,33	31,63
40 Persen Tengah	0	36,93	14,05	12,21	36,80
20 Persen Teratas	0	34,94	13,67	12,47	38,92
Cianjur	0,30	38,28	15,58	10,98	34,86

Sumber: Statistik Kesra Kabupaten Cianjur Tahun 2020

Penduduk usia 7-24 tahun dengan kelompok pengeluaran 20 persen teratas yang berstatus masih bersekolah di jenjang SD/ sederajat adalah sebesar 34,94 persen, jenjang SMP/ sederajat sebesar 13,67 persen, dan SMA/ sederajat 12,47 persen.

Persentase terbesar penduduk usia 7-24 tahun yang berstatus masih sekolah di jenjang SD/ sederajat berasal dari kelompok pengeluaran 40 persen terbawah. Sedangkan persentase terkecil nya berasal dari kelompok pengeluaran 20 persen teratas. Demikian pula untuk jenjang SMP/ sederajat. Sedangkan untuk jenjang

SMA/ sederajat berlaku sebaliknya. Persentase terbesar penduduk usia 7-24 tahun yang berstatus masih sekolah di jenjang SMA ke atas berasal dari penduduk dengan kelompok pengeluaran 20 persen teratas.

Persentase terbesar untuk status tidak bersekolah lagi berasal dari kelompok pengeluaran 20 persen teratas. Besar persentase tersebut tidak berbeda jauh dengan kelompok pengeluaran 40 persen tengah. Besaran persentase kedua kelompok tersebut lebih besar dari persentase status tidak bersekolah lagi Kab Cianjur secara keseluruhan. Kelompok pengeluaran 40 persen terbawah merupakan kelompok yang terkecil persentasenya di status tidak bersekolah lagi.

Tabel 3.3 Persentase Penduduk 15 tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2020

Karakteristik	Tidak punya ijazah SD	SD/ sederajat	SMP/ Sederajat	SMA ke atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jenis Kelamin				
Laki-laki	9,23	47,37	18,12	25,28
Perempuan	13,05	47,56	20,87	18,52
Kelompok Pengeluaran				
40 Persen Terbawah	14,84	51,06	19,12	14,97
40 Persen Tengah	9,76	49,58	20,10	20,55
20 Persen Teratas	7,09	37,12	18,78	37,01
Kabupaten Cianjur	11,09	47,46	19,45	22,00

Sumber: Statistik Kesra Kabupaten Cianjur Tahun 2020

Pada tahun 2020 terdapat 47,46 persen penduduk usia di atas 15 tahun di Kabupaten Cianjur berijazah SD/ sederajat. Pendidikan tertinggi kedua terbanyak adalah SMA ke atas sebesar 22 persen disusul oleh SMP/ sederajat ke atas di tempat ketiga sebesar 19,45 persen. Terdapat 11,09 persen

penduduk Kabupaten Cianjur yang berusia di atas 15 tahun yang tidak mempunyai ijazah sama sekali.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, kelompok pengeluaran 20 persen teratas memiliki persentase lulusan SMA keatas tertinggi dengan 37,01 persen, walaupun tidak dapat dipungkiri dengan pengeluaran yang tergolong tertinggi 7,09 persen diantaranya masih belum memiliki ijazah. Dan untuk kelompok pengeluaran 40 persen terbawah kebanyakan penduduknya memiliki ijazah tertinggi SD sederajat (51,06 persen).

<https://cianjurkab.bps.go.id>

BAB IV KETENAGAKERJAAN

Salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah adalah permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan,

persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja, persentase pekerja anak, serta persentase pekerja menurut kelompok upah/gaji/pendapatan bersih.

4.1. Angkatan kerja dan pengangguran

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

Tabel 4.1. Persentase Penduduk Usia Kerja Berdasarkan Karakteristik, Cianjur 2020

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja	768.382	417.213	1.185.5950
Bekerja	672.890	381.689	1.054.579
Pengangguran Terbuka	95.492	35.524	131.016
Bukan angkatan kerja	114.131	412.104	526.235
Penduduk Usia Kerja	882.513	829.317	1.711.830

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Prov. Jawa Barat Agustus 2020

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu sebanyak 61,61 persen dari total penduduk usia kerja atau 88,95 persen dari total angkatan kerja (1.054.579 orang). Dan berdasarkan jenis kelamin, penduduk berjenis kelamin perempuan memiliki persentase penduduk kerja yang lebih rendah dengan 46,02 persen dari seluruh penduduk usia kerja berjenis kelamin perempuan, sedangkan laki-laki 76,24 persen.

Tabel 4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Cianjur, 2020

Karakteristik	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
(1)	(2)	(3)
Cianjur	11,05	69,26

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Prov.Jawa Barat Agustus 2020

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) kabupaten Cianjur pada tahun 2020 adalah sebesar 69,26 persen dan dapat diartikan dari 100

penduduk usia kerja terdapat 69 orang diantaranya merupakan angkatan kerja. Dan bila dilihat lebih jauh penduduk yang bekerja didominasi penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dengan persentase 63,80 persen sedangkan perempuan bekerja sebesar 36,20 persen.

4.2. Lapangan usaha dan status pekerjaan

Jika dilihat berdasarkan lapangan pekerjaan maka sektor Jasa menyerap tenaga kerja paling banyak yaitu sebesar 437.817 orang atau 41,52 persen disusul pertanian menyerap tenaga kerja sebanyak 410.638 orang atau 38,93 persen. Dua sektor ini memang banyak menyerap tenaga kerja karena sesuai dengan kondisi sosial dan geografi Cianjur yang memiliki sawah cukup luas dan karakteristik penduduk yang lebih banyak bekerja di bidang non formal (pedagang dan penyedia jasa lainnya). Pemerintah dapat mengutamakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja untuk mengatasi masalah pengangguran.

Tabel 4.3. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cianjur 2020

Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	39,66	37,67	38,93
Manufaktur	23,08	13,32	19,55
Jasa	37,26	49,01	41,52
Jumlah/Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Prov. Jawa Barat Agustus 2020

4.3. Jenis Pekerjaan Utama

Tabel 4.4. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cianjur, 2020

Status Pekerjaan Utama (1)	Jenis Kelamin		Jumlah (4)
	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	
Berusaha sendiri	18.75	16.12	17.80
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar	20.06	13.23	17.59
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	6.23	2.51	4.88
Buruh/Karyawan/Pegawai	24.60	23.02	24.03
Pekerja bebas di pertanian	12.06	10.33	11.43
Pekerja bebas di non pertanian	12.54	4.43	9.61
Pekerja keluarga/tak dibayar	5.75	30.37	14.67
Jumlah/Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Prov. Jawa Barat Agustus 2020

Jika melihat status pekerjaan maka tenaga kerja di Cianjur paling banyak bekerja sebagai buruh dan karyawan yaitu sebanyak 24,03 persen, berusaha sendiri sebanyak 17,80 persen, berusaha dibantu buruh tidak tetap 17,59 persen, dan yang lainnya pekerja bebas, berusaha dibantu buruh tetap, dan pekerja tidak dibayar. Tingginya status pegawai, buruh, dan karyawan menunjukkan bahwa tenaga kerja di kabupaten Cianjur mulai banyak di serap sektor industri. Kebijakan pemerintah daerah yang membuka ruang investasi di sektor industri cukup berdampak pada perekonomian di Kabupaten Cianjur.

BAB V

TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

5.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok

Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah.

penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 5.1. PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Kab. Cianjur Menurut Pengeluaran Tahun Cianjur 2016-2020 (Juta Rupiah)

JENIS PENGELUARAN	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	29.445.549,81	31.607.518,92	33.280.740,79	36.121.791,81	36.391.301,07
Pengeluaran Konsumsi LNPR	80.357,11	86.012,34	106.828,03	115.036,86	115.832,21
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.998.191,44	2.956.900,37	3.160.552,88	3.286.115,87	3.307.997,46
Pembentukan Modal Tetap Bruto	9.728.258,80	10.674.531,59	11.784.307,38	12.745.719,79	11.275.928,33
Perubahan Inventori	1.260.551,83	1.313.068,44	1.381.794,36	1.406.889,44	679.564,70
Net Ekspor Barang dan Jasa	(8.126.451,27)	(8.063.030,26)	(6.595.804,02)	(6.164.305,60)	(4.247.135,18)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	35.386.457,73	38.575.001,40	42.971.245,40	46.956.052,38	47.523.488,61

Sumber : PDRB Kab.Cianjur Menurut Pengeluaran 2016-2020

Berdasarkan tabel 5.1 Konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku di Kabupaten Cianjur sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan tingkat kehidupan masyarakat Cianjur semakin menuju arah yang lebih baik dalam pemenuhan kebutuhan. Pada tahun 2020 kebutuhan konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Cianjur mencapai 76,58 persen dari total PDRB Cianjur.

5.2 Struktur Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan atas dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran untuk makanan (pangan) dan pengeluaran non makanan (non pangan). Pengeluaran rumah tangga sering digunakan sebagai proksi dari pendapatan rumah tangga. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan.

Tabel 5.2. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Rupiah), 2020

Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran			Total Pengeluaran
	40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Padi-padian	57.044	65.966	83.784	65.961
2. Umbi-umbian	2.642	5.936	10.079	5.448
3. Ikan	17.525	32.706	62.290	32.550
4. Daging	11.719	25.210	60.094	26.788
5. Telur dan susu	12.508	21.263	49.246	23.355
6. Sayur-sayuran	20.225	35.244	56.290	33.447
7. Kacang-kacangan	6.209	10.672	16.957	10.144
8. Buah-buahan	9.064	21.693	51.288	22.559
9. Minyak dan kelapa	7.006	10.519	15.783	10.167
10. Bahan minuman	10.652	18.276	29.375	17.447
11. Bumbu-bumbuan	5.231	9.961	15.683	9.214
12. Bahan makanan lainnya	6.219	11.850	19.068	11.042
13. Makanan minuman jadi	91.218	167.625	292.088	161.960
14. Rokok dan tembakau	35.867	86.453	170.168	82.965
Jumlah Makanan	293.129	523.374	932.192	513.047
15. Perumahan dan fasilitas rumah tangga	87.712	188.903	466.886	204.005
16. Aneka barang dan jasa	37.145	83.845	277.299	103.833
17. Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	12.389	30.108	70.023	31.002
18. Barang tahan lama	3.099	17.883	119.368	32.250
19. Pajak, pungutan dan asuransi	9.693	16.719	50.122	20.585
20. Keperluan pesta dan upacara/kenduri	5.181	10.405	81.281	22.477
Jumlah Bukan Makanan	155.219	347.863	1.064.978	414.151
Jumlah Pengeluaran Kabupaten Cianjur	448.348	871.237	1.997.170	927.198

Sumber : Statkersra Kab.Cianjur Tahun 2020

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan di Kab. Cianjur pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 927.198,- yang terdiri dari pengeluaran makanan sebesar Rp 513.047,- dan Rp. 414.151,- untuk pengeluaran bukan makanan. Pengeluaran per kapita penduduk. Pada tahun 2020, pengeluaran makanan mencakup 55,33 persen dari seluruh pengeluaran konsumsi penduduk Kab. Cianjur, dengan 31,56 persen diantaranya merupakan pengeluaran untuk sub kelompok Makanan dan Minuman Jadi. Sedangkan untuk pengeluaran non makanan, pengeluaran tertinggi dipegang oleh sub kelompok Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga dengan persentase 49,25 persen.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah terdapatnya perbedaan yang tinggi antara rata-rata pengeluaran antara kelompok pengeluaran 40 persen terbawah dengan 20 persen teratas yang gap mencapai Rp. 1.548.841,-. Selain itu, penduduk yang tergolong kedalam kelompok pengeluaran 20 persen teratas memiliki persentase pengeluaran non makanan lebih tinggi yaitu 53,32 persen, sedangkan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah berbanding terbalik dengan 65,37 persen pengeluarannya untuk makanan.

BAB VI PERUMAHAN

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketenteraman hidup bagi manusia. Dalam fungsinya sebagai pengamanan diri bukan berarti menutup diri tetapi harus membuka diri menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan (Kepmen no.9 tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang.

6.1. Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal. Yang termasuk dalam kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2020

Karakteristik	Sendiri	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Cianjur	78,71	21,29	100

Sumber: Statistik Kesra Kabupaten Cianjur Tahun 2020

Berdasarkan penggunaan fasilitas tempat buang air besar ada sebanyak 78,71 persen penduduk memiliki dan menggunakan sendiri fasilitas buang air besar, 21,29 persen menggunakan MCK lainnya.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2020

Karakteristik	Tempat Pembuangan Akhir Tinja		Jumlah
	Tangki Septik	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)
Cianjur	42,43	57,57	100

Sumber: Statistik Kesra Kabupaten Cianjur Tahun 2020

Berdasarkan fasilitas tempat buang air besar 42,43 persen menggunakan tangki septik dan 57,57 persen lainnya.

**Tabel 6.6 Persentase Rumah Tangga
Menurut Sumber Air Minum Utama, 2020**

Karakteristik	Sumber Air MCK Utama				
	Ledeng	Sumur Pompa	Mata air terlindung	Mata air tidak terlindung	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Cianjur	4,34	25,72	49,89	9,83	10,22

Sumber: Statistik Kesra Kabupaten Cianjur Tahun 2020

Berdasarkan sumber air MCK utama sebanyak 49,89 persen menggunakan sumur/mata air terlindung, 25,72 persen menggunakan sumur pompa, 9,83 persen Mata Air tak terlindung, dan 10,22 persen lainnya.

Kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman adalah kondisi fisik, kimia, dan biologis di dalam rumah, di lingkungan rumah dan perumahan, sehingga memungkinkan penghuni mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. Persyaratan kesehatan perumahan dan pemukiman serta persyaratan rumah itu sendiri sangat diperlukan karena pembangunan perumahan berpengaruh sangat besar terhadap peningkatan derajat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat (Sanropie, 1992).

BAB VII SOSIAL LAINNYA

Perjalanan wisata menjadi salah satu indikator sosial yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, gaya hidup masyarakat juga cenderung berubah dengan melakukan pemenuhan kebutuhan tersier yang salah satunya adalah berwisata. Tujuan melakukan perjalanan wisata biasanya untuk relaksasi, menikmati hari libur, menikmati pemandangan alam dan lain-lain.

Aspek sosial lain seperti akses pada teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menjadi indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Perkembangan gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang didapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon selular pintar dan komputer. Jenis akses dan media informasi yang beragam tentunya menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mengikuti tren gaya hidup modern. Semakin terjangkau harga telepon pintar dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi yang mereka inginkan.

Perkembangangaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi

7.1. Akses Informasi dan Komunikasi

Perkembangan telepon seluler cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa atau telepon rumah. Pesatnya perkembangan teknologi telepon seluler membuat telepon rumah semakin ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kepemilikan telepon rumah dan meningkatnya kepemilikan telepon seluler. Penggunaan telepon rumah yang mengharuskan seseorang berada di posisi tertentu yang terpasang jaringan telepon semakin ditinggalkan masyarakat karena dianggap kurang efisien dalam mendukung mobilitas penggunanya.

Tabel 7.1 Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir, 2020

Karakteristik	Menggunakan HP/ Telepon Seluler/ Jaringan Nirkabel	Mengakses Internet termasuk Facebook, Instagram, Twitter, BBM, WA, dll)
(1)	(2)	(3)
Cianjur	75,46	44,20

Sumber: Statistik Kesra Kabupaten Cianjur Tahun 2020

Alat yang sering digunakan untuk mengakses informasi dan komunikasi adalah telepon selular dan laptop. Pada tahun 2020 di Kabupaten Cianjur tercatat 75,46 persen anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas menggunakan telepon seluler/nirkabel/komputer/laptop. Dan yang mengakses internet 44,20 persen. Masih terdapat beberapa wilayah Cianjur selatan yang kesulitan sinyal sehingga berpengaruh pada minimnya akses internet.

7.2. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan hal penting di masyarakat, Keberadaan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar menjadikan perlindungan sosial masih diperlukan. Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa perlindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani guncangan dan kerentanan sosial. Pemberdayaan diarahkan agar masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya.

Beberapa bentuk perlindungan sosial yang disediakan oleh pemerintah di antaranya adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Keluarga Harapan (PKH).

Tabel 7.2 Persentase Rumah Tangga yang mendapat Program Perlindungan Sosial menurut Karakteristik Tahun 2020

Jenis Program Perlindungan Sosial	Persentase Rumah tangga yang menerima
(1)	(2)
Raskin/Rastra/BPNT	22,04
Program Indonesia Pintar (PIP)	10,60
Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	26,67
Program Keluarga Harapan (PKH)	16,51

Sumber: Statistik Kesra Kabupaten Cianjur Tahun 2020

ISTILAH TEKNIS

Air Minum Bersih	Air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (septic tank) > 10 meter.
Angka Beban Tanggungan	Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100.
Angka Harapan Hidup	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.
Angka Kematian Bayi	Probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).
Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR)	Banyaknya kelahiran per seribu wanita dari golongan umur 15-49 tahun yang terjadi pada waktu tertentu.
Angka Kelahiran Total	Banyaknya anak yang diperkirakan dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksi dengan anggapan bahwa perilaku kelahirannya mengikuti pola kelahiran tertentu tanpa memperhitungkan angka kelangsungan hidup wanita.
Angka Kelahiran Kasar	Angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran untuk setiap seribu penduduk yang terjadi di suatu daerah pada waktu tertentu.

Angka Kesakitan	Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari.
Angka Melek Huruf	Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.
Angka Partisipasi Sekolah	Rasio anak yang sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama.
Angka Putus Sekolah	Proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.
Angka Partisipasi Murni	Proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.
Angkatan Kerja	Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan.
Bekerja	Melakukan kegiatan/pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam terus-menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi). Mereka yang mempunyai pekerjaan tetap tetapi sementara tidak bekerja dianggap sebagai bekerja.

Indeks Gini	Ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Koefisien Gini terletak antara nol yang mencerminkan pemerataan sempurna dan satu yang menggambarkan ketidakmerataan sempurna.
Jumlah Jam Kerja Seluruhnya	Jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal diluar pekerjaan).
Kepadatan Penduduk Lapangan Usaha	Rata-rata banyaknya penduduk per kilometer persegi. Bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Kegiatan in mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam satu digit.
Masih Bersekolah	Sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi ' Penduduk Usia Kerja Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.
Penganggur	Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.
Pengangguran Terbuka	Mereka yang termasuk pengangguran terbuka adalah : a. Yang mencari pekerjaan b. Yang mempersiapkan usaha c. Yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan d. Yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Pengeluaran	Pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman,

Pekerja Tidak Dibayar	<p>tembakau dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.</p> <p>Seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga atau bukan anggota rumah tangga tanpa mendapat gaji</p>
Perjalanan	<p>Melakukan perjalanan pergi pulang (PP) sejauh minimal 100 Kilometer dan tidak dalam rangka mencari nafkah dan tidak dilakukan secara rutin</p>
Perkotaan	<p>Karakteristik sosial ekonomi dari wilayah administratif terkecil. Wilayah ini dikatakan sebagai perkotaan jika memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, lapangan kegiatan ekonomi utama, fasilitas-fasilitas perkotaan (jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya). Secara operasional penentuan daerah perkotaan dibuat dengan sistim skoring tertentu. Prosedur penentuan daerah perkotaan berlaku sejak tahun 1980 dan masih berlaku hingga saat ini.</p>
Peserta Keluarga Berencana (Akseptor)	<p>Orang yang mempraktikkan salah satu metode kontrasepsi.</p>
Rasio Jenis Kelamin	<p>Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di satu daerah pada waktu tertentu.</p>
Rata-Rata Lama Sekolah	<p>Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.</p>

Status Gizi	Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Kategori status gizi ini dibuat berdasarkan Standar WHO/NCHS.
Status Pekerjaan	Kedudukan seseorang dalam unit usaha/kegiatan dalam melakukan pekerjaan.
Tamat Sekolah	Menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat ijazah. Orang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan lulus dianggap tamat sekolah.
Tingkat Partisipasi Angkatan	Kerja Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.
Tingkat Pertumbuhan Penduduk	Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase.

SUMBER DATA

Sensus Penduduk (SP)	Penduduk	<p>Sensus Penduduk (SP) diselenggarakan tiap 10 tahun untuk mengumpulkan data dasar penduduk dan rumah tangga di seluruh wilayah geografis Indonesia. Sejak era kemerdekaan Indonesia telah menyelenggarakan 6 kali sensus penduduk yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan 2020.</p> <p>SP menggunakan dua tahap pencacahan; yaitu, pencacahan lengkap dan pencacahan secara sampel. Pencacahan lengkap meliputi semua orang yang berada di wilayah geografis Indonesia, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing (kecuali anggota Korps Diplomatik beserta keluarganya), awak kapal berbendera Indonesia dalam perairan Indonesia, maupun para tuna wisma (gelandangan) yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Pencacahan sampel mencakup semua penduduk yang bertempat tinggal di blok-blok sensus/wilayah pencacahan yang terpilih secara acak dan mencakup sekitar 5 persen rumah tangga.</p>
Survei Ekonomi (SUSENAS)	Sosial Nasional	<p>Kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dimulai pada tahun 1963. Sampai dengan tahun 2010 telah diadakan 40 kali survei. Susenas mengumpulkan data kependudukan, pendidikan, kesehatan/gizi, perumahan/lingkungan hidup, kegiatan sosial budaya, konsumsi dan pendapatan rumah tangga, dan perjalanan. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang umum dikumpulkan melalui pertanyaan kor (pokok) setiap tahun. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang lebih spesifik, dikumpulkan melalui pertanyaan modul setiap tiga</p>

tahun. Pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan secara berkala dalam pertanyaan modul adalah :

- (a) Konsumsi/Pengeluaran
- (b) Kesehatan, Perumahan dan Pemukiman
- (c) Sosial Budaya dan Pendidikan.

Sampai tahun 1991 ukuran sampel Susenas beragam dari 25 ribu sampai 100 ribu rumah tangga. Pada tahun 1992, sistem pengumpulan data Susenas diperbaharui, yaitu informasi yang digunakan untuk menyusun Inkesra yang terdapat dalam modul (keterangan yang dikumpulkan tiga tahun sekali) ditarik ke dalam kor (kelompok keterangan yang dikumpulkan tiap tahun). Pada tahun 1993 ukuran sampelnya menjadi sekitar 205 ribu rumah tangga. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah sampel rumah tangga juga meningkat. Pada tahun 2010, jumlah sampel rumah tangga mencapai lebih dari 300 ribu rumah tangga tepatnya sekitar 304.368 rumah tangga. Peningkatan jumlah sampel tersebut akan memungkinkan dilakukan penyajian data sampai tingkat kabupaten/kotamadya. Dengan adanya peningkatan jumlah sampel tersebut BPS melibatkan mitra statistik selain mantri statistik dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan. Mulai tahun 2011 Susenas dilaksanakan secara Triwulan yaitu Triwulan I dilaksanakan bulan Maret, Triwulan II dilaksanakan bulan Juni, Triwulan III dilaksanakan bulan September, dan Triwulan IV dilaksanakan bulan Desember. Setiap Triwulan didistribusikan sampel sebanyak 75.000 rumah tangga. Pada Tahun 2019 Susenas dilaksanakan Semesteran.

Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)

Kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pertama kali dilakukan pada tahun 1976 untuk melengkapi data kependudukan

khususnya ketenagakerjaan. Sejak tahun 1986-1993, pelaksanaan Sakernas dilakukan 4 kali dalam setahun pada bulan-bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Tetapi mulai 1994-2001 pelaksanaannya dilakukan sekali dalam setahun yaitu sekitar bulan Agustus dengan sampel sekitar 65.000 rumah tangga. Selama periode tahun 2002-2004, Sakernas selain dilakukan secara triwulanan juga dilakukan secara tahunan. Pada tahun 2005-2010 Sakernas dilakukan semesteran dilakukan pada bulan Februari dan November, sedangkan pada tahun 2011-2014 kembali dilakukan triwulanan yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Pada tahun 2019 Sakernas dilaksanakan Semesteran

<https://cianjurkab.bps.go.id>



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Cianjur
Telp.0263-264762
Email: bps3203@bps.go.id
Website: <https://cianjurkab.bps.go.id>